



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I MADE RAI YASA
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 497161

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.305.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/97 m2 di KAB / KOTA KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
2. Tanah Seluas 4210 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 4.200.000.000
3. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, WARISAN Rp. 2.250.000.000
4. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 137.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. LAINNYA, POLYGON SEPEDA GUNUNG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 121.250.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 49.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.612.250.000
III. HUTANG	Rp.	10.877.369
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.601.372.631

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.